

Administrasi Publik berbasis Governance



Topik :

- **What is Governance ?**
- **Good Governance**
- **Paradigma Administrasi Publik berbasis Governance**





What is Governance ?



PENGERTIAN GOVERNANCE

GOVERNMENT

Webster:

- Pemerintah
- The exercise of authority over a state, organization, etc
- A **system of ruling**, political administration, etc
- Those who direct the **affairs of a state**; administration

GOVERNANCE

Webster :

- The action, function, or power of government

UNDP & World Bank :

- Sistem administrasi yang **melibatkan banyak pelaku**, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik

Pengertian Governance

Joko Widodo (2001)

- “Governance” lebih inklusif daripada “government”.
- “**Government**” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (**Negara** dan pemerintah).
- “**Governance**” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara , tapi juga peran berbagai **aktor di luar pemerintah dan negara**, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan sangat luas



Pengertian Governance

Agus Dwiyanto (2003)

- Governance atau tata pemerintahan adalah sistem administrasi publik yang melibatkan banyak pelaku (**multistakeholders**) dari pemerintah dan nonpemerintah.



Pengertian Governance

- **Perbedaan** paling pokok antara konsep “*government*” dan “*governance*” terletak pada bagaimana **cara penyelenggaraan kekuasaan** (otoritas) politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa.
- Konsep “**government/pemerintahan**” berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai kekuasaan (otoritas).
- Sedangkan dalam “**governance**” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu bangsa



Pengertian Governance

- governance is not just about how a government and social organizations interact, and how they relate to citizens [Graham, Amos, Plumptre 2003],
- but it concerns the State's ability **to serve** citizens and other actors, as well **as the manner** in which public functions are carried out, public resources are managed and public regulatory powers are exercised [European Commission 2003].

A digital wireframe globe is positioned on a grid floor. The globe is composed of a mesh of blue and green lines, giving it a transparent, digital appearance. The floor is a dark blue grid that recedes into the distance. The text "What is good governance?" is written in a bold, white, sans-serif font across the middle of the image, partially overlapping the globe and the floor. The overall scene is set against a dark background with some faint, glowing lines and a small circular logo in the bottom left corner.

What is good governance ?

PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

Good Governance (World Bank) :
cara kekuasaan di gunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).



Pengertian Good Governance

- Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan **pengaruh sektor negara** dan **non negara** dalam suatu kegiatan kolektif
- Sistem administrasi yang **melibatkan banyak pelaku, jaringan dan institusi di luar pemerintah** untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik
- Dalam governance aktor-aktor/unsur-unsur **masyarakat memiliki kewenangan untuk mempengaruhi dan terlibat dalam proses kebijakan publik**

Pengertian Good Governance

- Konsep *good governance* menekankan **kesetaraan** antara **lembaga-lembaga negara** baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor **swasta** dan **masyarakat madani** (civil society)
- Karakteristik :
Pertama,
praktek good governance harus **memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah** untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka



Pengertian Good Governance

Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti **efisiensi**, **keadilan**, dan **daya tanggap** menjadi nilai yang penting.



Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang **bersih** dan **bebas dari korupsi** serta berorientasi pada **kepentingan publik**. Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

STAKEHOLDERS GOOD GOVERNANCE

Aktor kunci / *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam Governance , mencakup 3 domain *good governance*, yaitu:

- a. **Pemerintah** (peran: menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif; menyediakan pelayanan publi yang berkualitas)
- b. **Sektor swasta** (peran: menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan)
- c. **Masyarakat/civil society** (peran: mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi)



STAKEHOLDERS GOOD GOVERNANCE

Peran stakeholders :

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil – **enabling setting**
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. Menyediakan public service yang berkualitas, efektif dan accountable
- d. Menegakkan HAM
- e. Melindungi lingkungan hidup
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik



STAKEHOLDERS GOOD GOVERNANCE

2. Sektor Swasta

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Mentaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM



STAKEHOLDERS GOOD GOVERNANCE

3. Masyarakat Madani (civil society)

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Mempengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana *checks and balances* pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. Mengembangkan SDM
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat





GOVERNANCE



Prinsip Good Governance

World Bank dan UNDP :

1. **Participation**
2. **Rule of law**
3. **Transparancy**
4. **Responsiveness**
5. **Consensus orientation**
6. **Equity**
7. **Effectiveness and efficiency**
8. **Accountability**
9. **Strategic vision**



Partisipasi

1. Partisipasi (Participation)

- Semua warga negara berhak **terlibat dalam keputusan**, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
- Pemerintah harus menjadi **public server** dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.



Penegakan Hukum



Rules

Perwujudan good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- a. **Supremasi Hukum**, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tegas dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- b. **Kepastian hukum**, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

Penegakan Hukum (lanjut)

- c. **Hukum yang responsive**, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang **konsisten dan nondiskriminatif**, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya
- e. **Independensi peradilan**, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya



Transparansi

3. Tranparasi (Transparency)

Sistem transparansi sangat penting dalam pembentukan clean and good government. Dalam pengelolaan negara, Goffer berpendapat bahwa terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparansi, yaitu :

- a. Penetapan posisi dan jabatan.
- b. Kekayaan pejabat publik.
- c. Pemberian penghargaan.
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
- e. Kesehatan.
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
- g. Keamanan dan ketertiban.
- h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Responsivitas

4. Responsif (Responsiveness)

- Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus aktif menanggapi dan mencari tahu kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak hanya menunggu aspirasi dari masyarakat saja.

Keadilan dan Kesetaraan

5. Keadilan dan Kesetaraan (Equity)

- Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berperilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal



Paradigma Administrasi Publik sebagai Governance



Administrasi Publik sebagai Governance

- Domain administrasi publik sebagai 'governance' tidak hanya mencakup lingkup/ranah yg terbatas negara, tp juga semua ranah/aktor yg terlibat dlm urusan publik.
- **Lokus** adm.publik sbg 'governance' adl **keseluruhan** aktor/lembaga yg menjalankan fungsi publik.
- **Fokus** studi administrasi publik mencakup :
 - bgmn fungsi yg dijalankan organisasi sukarela, organisasi non profit, orgn bisnis, dan organisasi pemerintah dlm menjalankan pelayanan publik
 - bgmn interaksi antara orgn pemerintah dan non pemerintah

Dimensi	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik Sbg “Governance”
Lokus	<p>Publik diartikan sebagai “government”, state atau Negara</p> <p>Lokus studi : negara atau birokrasi</p>	<p>Pemerintah atau negara hanya salah satu aspek penting dari publik .</p> <p>Publik berarti keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yg terlibat dlm menjalankan fungsi publik</p> <p>Lokus : semua aktor yg terlibat dalam ‘public affair’</p>
Administrasi Publik	Menggambarkan manajemen urusan publik atau aspek implementasi dr hukum/kebijakan publik (administrasi negara)	Administrasi dan implementasi keseluruhan aspek dr bentuk2 atau manifestasi aktivitas publik yg bersifat kolektif

Pengertian	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik sbg Governance
Fokus	<p>Orientasi internal :</p> <p>Organisasi dan manajemen internal atau aktivitas pemerintah spt anggaran negara, manajemen kepegawaian, pelayanan jasa, dsb</p> <p>Eksekutif atau administrasi pemerintahan di tingkat pusat atau daerah.</p> <p>Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucracy)</p> <p>Prinsip2 manajemen</p> <p>Pemisahan (dikotomi) politik</p>	<p>Orientasi eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pola-pola organisasi manusia spt nilai-nilai kelompok dan organisasi serta bgmn nilai itu diekspresikan -bgmn fungsi yg dijalankan organisasi sukarela, organisasi non profit, orgn bisnis, dan organisasi pemerintah dlm menjalankan pelayanan publik -bgmn interaksi (networking) antara orgn pemerintah non pemerintah, dan organisasi bisnis -- bgmn orgn pemerintah menjalin kemitraan

Pengertian	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik sbg Governance
Nilai	Efisiensi Ekonomi Efektivitas	Efisiensi dan efektivitas Keadilan Transparansi Responsivitas Kesamaan di depan hukum Akuntabilitas publik Partisipasi, dsb

Dimensi	Old Public Administration	New Public Management	New Public Service / Governance
Peran negara	Rowing	Steering	Serving
Aparat negara responsif pada siapa ?	Clients	Customers	Citizens
Organizational structure	Bureaucratic	decentralized	Collaborative
Akuntabilitas	Hirarkis	Market-driven	Multifacet
Administrative discretion	Limited (administrative officials)	Wide to meet entrepreneurial goals	Discretion needed but constrained and accountable

